

Sanksi Tegas BGN untuk 1.251 SPPG Pelanggar Program Makan Bergizi Gratis

Updates. - WARTAWAN.ORG

Mar 20, 2026 - 17:55



Kepala BGN, Dadan Hindayana

JAKARTA – Kepedulian terhadap kesehatan masyarakat mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk bertindak tegas. Sebanyak 1.251 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh penjuru negeri harus menerima konsekuensi atas kelalaian dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil demi memastikan program yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini berjalan sesuai standar tertinggi.

Dari angka tersebut, mayoritas, yakni 1.030 SPPG, terpaksa disuspend operasionalnya. Sementara itu, 210 SPPG menerima Surat Peringatan tahap pertama (SP-1), dan 11 lainnya harus menghadapi SP-2. Penindakan ini bukan tanpa alasan; BGN menemukan berbagai pelanggaran serius yang mengkhawatirkan, mulai dari kondisi infrastruktur yang jauh dari kata layak, absennya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang krusial untuk kebersihan, hingga kegagalan mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang menjadi bukti kelayakan higienis.

“Kami tidak akan mentolerir pelanggaran standar dalam bentuk apa pun. Program ini menyangkut kesehatan masyarakat, sehingga kualitas harus menjadi prioritas utama,” tegas Kepala BGN, Dadan Hindayana, di Jakarta, Jumat (20/3/2026). Pernyataannya ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga integritas program yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat.

Analisis data menunjukkan bahwa Wilayah II, yang mencakup Pulau Jawa, menjadi daerah dengan jumlah sanksi terbanyak, yaitu 674 SPPG. Menyusul di belakangnya adalah Wilayah I (Sumatera) dengan 446 SPPG, dan Wilayah III (Indonesia bagian tengah dan timur) yang mencatat 131 SPPG. Temuan ini tentu menjadi pukulan telak dan sekaligus menjadi landasan bagi BGN untuk memperketat jaring pengawasan di seluruh tingkatan.

Dadan Hindayana kembali menekankan bahwa sanksi yang diberikan merupakan bagian integral dari proses pembinaan. “SP-1 dan SP-2 adalah peringatan keras agar pengelola segera melakukan perbaikan. Jika tidak diindahkan, penghentian operasional akan menjadi konsekuensi yang tidak bisa dihindari,” ujarnya, memberikan gambaran jelas mengenai konsekuensi yang menanti jika perbaikan tidak kunjung dilakukan.

Lebih lanjut, BGN tidak segan-segan menutup sementara 62 SPPG yang terbukti menyajikan menu makanan yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan program. Tindakan ini didasari kekhawatiran bahwa penyimpangan menu dapat mengikis tujuan utama program, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara signifikan.

“Kami ingin memastikan setiap makanan yang disalurkan benar-benar layak, aman, dan sesuai standar gizi. Tidak boleh ada kompromi dalam hal ini,” tambah Dadan, menegaskan prinsip tanpa kompromi dalam menjaga standar program. BGN berkomitmen untuk terus memperketat pengawasan melalui evaluasi berkala dan inspeksi lapangan yang lebih intensif. Langkah ini sekaligus menjadi alarm bagi seluruh pengelola SPPG agar menjalankan amanah program dengan profesionalisme, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. (PERS)